

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sarat akan potensi bencana gempa bumi dan tsunami yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Ini merupakan dampak dari wilayah Indonesia yang terletak di pertemuan dua jalur pegunungan aktif terpanjang di dunia (Wardhana, 1998). Bagian Indonesia Barat dilalui oleh mediteran *ring of fire*-sirkum pegunungan mediterania, yang memanjang dari laut mediteran di Eropa. Sedangkan di bagian Timur merupakan ujung dari Pacific *ring of fire*-sirkum api pasifik, yang berasal dari Pegunungan Rocky di Benua Amerika (Nungrat, 2001). Selain kedua sirkum tersebut di Indonesia juga terdapat tiga lempeng tektonik yang saling menyusun lempeng bumi Indonesia. Indonesia disusun oleh Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik (Cahyadi, 1976).

Di samping itu Indonesia memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai 81.000 km. Garis pantai Indonesia merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Anantasena, 2007). Keberadaan letak Indonesia yang seperti ini ditambah dengan panjangnya garis pantai memberikan potensi besar bagi Indonesia untuk ditimpa bencana alam khususnya tsunami. Kondisi seperti ini mengancam kehidupan Penduduk yang bermukim di sepanjang bibir pantai yang berada pada jalur aktif dari gempa bumi yang suatu saat bisa berpotensi tsunami.

Selama kurun waktu tahun 1600 sampai dengan 1999 telah terjadi 105 tempat kejadian tsunami yang mana 90% diantaranya disebabkan gempa tektonik, 9% oleh gunung meletus dan 1% oleh longsor (landslide) di dasar laut (Latiel, et. al., 2000). Data lain menunjukkan bahwa dari tahun 1600 sampai 2010 telah terjadi 108 kejadian tsunami, 99 kali tsunami disebabkan oleh gempa bumi, 9 kali tsunami disebabkan oleh letusan gunung berapi dan 1 kali oleh longsor di dasar laut (Diposaptono, 2011).

Berdasarkan data diatas sudah selayaknya Indonesia memiliki sebuah sistem diseminasi informasi di bidang kebencanaan termasuk gempabumi dan tsunami. Diseminasi informasi sangat penting dalam proses penyebaran informasi gempa bumi dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi. Proses diseminasi informasi memegang peranan penting dalam upaya mitigasi dan tindakan preventif ketika bencana terjadi. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.17/PER/M.Kominfo/03/2009, pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat. Melalui Diseminasi Informasi Nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami sangat dibutuhkan masyarakat terkait upaya mitigasi dan perlindungan masyarakat dari bahaya gempa bumi dan bahaya lanjutan gempa bumi seperti bahaya tsunami. Upaya mitigasi terkait evakuasi penduduk tidak terlepas dari proses diseminasi informasi gempa bumi dari Instansi pemerintah kepada masyarakat. Dalam diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami, BMKG sebagai pemberi informasi akan meneruskan informasi kepada institusi terkait sebagai penerima dan perantara peringatan (alert) kejadian gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat (interface institution), seperti: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Dalam Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika Polri, Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota, dan Media.

Diseminasi informasi dilakukan lima menit setelah gempa bumi terjadi. Informasi gempa bumi/peringatan tsunami akan didiseminasi melalui media komunikasi yang disebut 5 in 1, yaitu SMS, faksimil, e-mail, dan/atau telepon ke institusi-institusi terkait di daerah. Semua informasi akan ditayangkan juga pada website BMKG. Pesan SMS secara cepat didiseminasikan ke lembaga-lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di daerah. Diseminasi informasi dini diharapkan mampu memberikan tindakan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami jika terjadi. Waktu datang

tsunami diperkirakan 20 menit setelah gempa bumi terjadi.¹ Estimasi waktu datang gelombang tsunami sangat menentukan tindakan evakuasi. Proses diseminasi informasi yang diberlakukan secara efektif sangat membantu mitigasi masyarakat menghadapi bencana tsunami.

Diseminasi yang dihasilkan oleh Pusat Nasional Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia adalah parameter gempa bumi yang berpotensi tsunami maupun tidak berpotensi tsunami. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi peristiwa gempa bumi yang telah terjadi yang berisi waktu kejadian, lokasi, kekuatan gempa bumi, kedalaman gempa bumi dan jarak pusat gempa bumi dengan kota terdekat. Fungsi dari diseminasi ini agar rasa ketidaktahuan masyarakat mengenai kejadian gempa bumi dapat terjawab dengan data yang aktual serta mengikuti berita perkembangan terakhir. Diseminasi yang disampaikan mempunyai dampak yang bermanfaat bagi masyarakat.

Diseminasi informasi harus didukung oleh kemajuan teknologi. Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi, informasi dan multimedia saat ini berkembang pesat yang pada akhirnya mampu merubah tatanan dan interaksi sosial masyarakat, termasuk akses masyarakat akan informasi. Proses komunikasi dalam diseminasi informasi juga mengalami perubahan yang begitu pesat sebagai efek positif dari kemajuan teknologi

¹ Buku utama Standar Operating Procedure (SOP) Indonesia Tsunami Early Warning System , 2012, Hal. 17

informasi. Sumatera Barat saat ini menata komunikasi yang efektif dalam penanganan bencana, hal ini belajar dari kejadian gempa bumi besar dan merusak 30 September 2009.

Gempa bumi 30 September 2009 yang berpusat di 57 Km Barat Daya Kota Pariaman menyebabkan kepanikan luar biasa (Hope dan Mahardiko, 2010). Mitigasi bencana seolah-olah lumpuh dan tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Diseminasi informasi tidak berjalan efektif, kondisi ini membuat Kota Padang dan Kota Pariaman yang menjadi kota yang terdampak langsung dari bencana ini lumpuh total. Kesemrawutan dalam proses evakuasi sampai proses rehabilitasi terjadi. Belajar dari kegagalan komunikasi ini, Propinsi Sumatera Barat mulai menata diri dalam hal diseminasi informasi. Hampir tahun sudah berlalu dari gempa bumi 30 September 2009. Kajian ilmiah tingkat internasionalpun telah dilaksanakan di Kota Padang, semua dengan tujuan terbentuknya diseminasi informasi yang efektif untuk menekan angka korban akibat bencana gempa bumi.

Kota Pariaman merupakan satu dari tujuh kab/ kota administratif di Sumatera Barat yang berada di pinggir pantai barat Sumatera Barat yang rawan terhadap bencana gempa bumi yang berpotensi bahaya tsunami. Topografi wilayah Kota Pariaman yang jauh dari perbukitan, memiliki pantai yang landai, memiliki bibir pantai yang panjang serta tidak memiliki gedung yang tinggi sebagai tempat evakuasi vertikal, sangat membutuhkan informasi gempa bumi dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami. Dari

pemetaan secara visual kondisi ini menggambarkan kehidupan sebagian penduduk Kota Pariaman berada pada zona merah rawan bahaya tsunami. Hal ini senada dengan informasi yang diberikan oleh Kepala BPBD Kota Pariaman. Menurut Asrizal, saat ini 40 persen penduduk Kota Pariaman berada di zona merah, yakni radius 500 meter dari garis pantai. Daerah tersebut umumnya kawasan padat pemukiman, seperti di Desa Nareh 1, Balai Nareh, Nareh Hilia, Kecamatan Pariaman Utara”.²

Proses komunikasi dalam diseminasi informasi yang terstruktur dan jelas tentu akan membuat upaya mitigasi dalam kegiatan evakuasi penduduk Kota Pariaman sangat dibutuhkan. Jika bencana gempa bumi dan berpotensi tsunami terjadi di Kota Pariaman dengan dukungan proses diseminasi yang terstruktur dan jelas maka tidak akan terjadi kepanikan di level masyarakat. Belajar dari kejadian gempa bumi 30 September 2009, belum adanya proses diseminasi informasi gempa bumi yang tercipta sehingga kepanikan dalam upaya mitigasi terkait evakuasi penduduk terjadi. Dalam hal ini proses diseminasi informasi mengalami permasalahan.

Pemerintah Kota Pariaman melalui BPBD sejak tahun 2011 telah melakukan sosialisasi tentang bencana gempa bumi dan tsunami. Di tahun 2011 sosialisasi dilakukan untuk tingkat SKPD terkait kebencanaan(pengambil

² <https://m.facebook.com/notes/media-center-dishub-kominfo-kota-pariaman/pemko-pariaman-usulkan-pembangunan-13-unit-shelter/10151106948923227/>, diakses tanggal 26 Januari 2016 Pukul 12.46 WIB.

kebijakan), di tahun 2012 sosialisasi diperuntukkan kepada Pemerintahan di tingkat kecamatan hingga kelurahan, di tahun 2013 sosialisasi juga telah diberikan kepada relawan organisasi yang terlibat secara sosial dengan kebencanaan seperti PMI, RAPI, Tagana dan Kelompok Siaga Bencana. Tahun 2014 secara langsung sosialisasi telah menyentuh masyarakat dengan mengadakan sosialisasi terkait gempa bumi dan tsunami yang diperuntukkan bagi komunitas masjid peduli bencana. Dalam hal ini dari tahun 2011-2013 penulis terlibat langsung dalam setiap proses sosialisasi bahaya gempa bumi dan tsunami sebagai narasumber dari BMKG (instansi penulis bekerja).

Kegiatan sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan tsunami yang dilakukan pemerintah Kota Pariaman yang berlangsung secara berkelanjutan dari tahun ke tahun merupakan bentuk langsung dari proses pembentukan sistem diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami. Namun, sampai saat ini proses diseminasi informasi gempa bumi selalu tidak berjalan efektif. Hal ini terlihat adanya kepanikan di tingkat masyarakat sebagai level terbawah penerima informasi gempa bumi. Selain kepanikan, isu gempa bumi yang lebih besar juga sering terjadi jika masyarakat Kota Pariaman merasakan gempa bumi kuat. Isu akan terjadinya gempa bumi besar ini membuat masyarakat kota Pariaman selalu merasa cemas karena akan diikuti tsunami. Pemahaman yang berbeda seperti ini sering terjadi meskipun BMKG telah melakukan diseminasi informasi

Kondisi Kota Pariaman yang belum memiliki infrastruktur sebagai tempat evakuasi sementara dan kondisi geografis Kota Pariaman yang memiliki pantai yang landai, bibir pantai yang panjang serta jauh dari perbukitan dan kurang pahami masyarakat terhadap informasi yang telah didiseminasikan, Kota Pariaman seharusnya telah memiliki sebuah komunikasi yang efektif dalam diseminasi informasi. Komunikasi efektif dalam diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami sangat dibutuhkan untuk kesiapsiagaan masyarakat Kota Pariaman dalam mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Idealnya dengan ilmu yang sudah diberikan dari sosialisasi telah terbentuk sistem diseminasi informasi yang baik. Sistem diseminasi informasi yang baik didukung dengan komunikasi yang efektif tentunya akan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan akan menciptakan masyarakat Kota Pariaman yang siaga akan bahaya gempa bumi dan potensi tsunami.

I.2 Rumusan Masalah

Pemahaman informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di masyarakat masih lemah. Masyarakat masih kurang paham akan informasi yang diberikan sehingga kepanikan masih saja terjadi di setiap gempa bumi yang dirasakan kuat oleh masyarakat. Dari kejadian gempa bumi terakhir yang dirasakan kuat oleh masyarakat Kota Pariaman, yaitu gempa bumi yang terjadi tanggal 17 Januari 2016 dengan magnitudo 5,2 SR yang berpusat di laut, 107 Km Barat laut Kota Pariaman, Masyarakat yang meminta informasi langsung ke kantor BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang melalui saluran telepon 17

orang, 13 orang diantaranya menanyakan kembali apakah berpotensi tsunami atau tidak. Hal ini juga terjadi di setiap kejadian gempa bumi yang dirasakan kuat oleh masyarakat pada gempa bumi sebelumnya. Ini membuktikan informasi yang diberikan ke masyarakat belum dipahami secara jelas. Pemahaman informasi dini gempa bumi dan tsunami sangatlah penting dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami.

Menurut penulis permasalahan komunikasi dalam hal diseminasi informasi seperti halnya yang telah diuraikan di atas penting untuk diteliti dan sampai saat ini belum ada penelitian terkait strategi komunikasi dalam diseminasi Informasi gempa bumi dan tsunami di Kota Pariaman sebagai bentuk mitigasi bencana kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa strategi komunikasi yang telah dilakukan dalam diseminasi informasi gempa bumi di Kota Pariaman?
2. Mengapa masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami di Kota Pariaman.?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui strategi komunikasi seperti apa yang telah dilakukan dalam diseminasi informasi gempa bumi di Kota Pariaman?
2. Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami di Kota Pariaman?

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian strategi komunikasi di bidang kebencanaan, khususnya terkait pada penelitian strategi komunikasi dalam diseminasi informasi gempa bumi

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kota Pariaman dan Kota/ Kab lainnya di Sumatera Barat terkait strategi komunikasi dalam diseminasi informasi gempa bumi dalam mewujudkan upaya mitigasi terkait bencana gempa bumi.

